

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembangunan di DKI Bakal Amburadul

Anggaran Dipangkas Rp 6 Triliun

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta berencana memangkas anggaran sebesar Rp6 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Dari semula sebesar Rp95,99 triliun menjadi Rp89,441 triliun.

Pemangkasan anggaran sekitar Rp6 triliun ini berpotensi membuat berantakan program pembangunan di Jakarta.

Menurut Sekdaprov DKI Jakarta, Saefullah, pemangkasan anggaran lantaran dana bagi hasil tidak dikucurkan pemerintah pusat. Karena itu, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus direvisi.

"Revisi KUA-PPAS itu karena dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp6 triliun tidak disetorkan. Artinya pemerintah pusat memiliki utang kepada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp6 triliun," kata Saefullah, Kamis (24/10).

Saefullah menjelaskan, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. "Kami akan bahas bersama Dewan mana saja yang harus direvisi anggarannya," ucapnya.

PERENCANAAN TIDAK MATANG

Bakal dipangkasnya anggaran mencapai Rp6 triliun mengundang reaksi publik. Azas Tigor Nainggolan, pengamat perkotaan, mengatakan, revisi anggar-

an mencerminkan perencanaan yang tidak profesional. "Mestinya soal yang beginian sudah bisa diprediksi atau diketahui jauh hari," kritiknya.

Menurut Azas, dengan revisi anggaran maka tentu akan berdampak pada pembangunan. "Bila tidak cermat maka rencana pembangunan bisa berantakan dan tentu saja yang rugi adalah rakyat," tegasnya.

Ketua Forum Warga Jakarta ini, meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak jor-joran dalam membelanjakan APBD. Sebab, dengan besarnya belanja akan membebani masyarakat.

"Pastinya nanti yang dibebani masyarakat. Misalnya tarif pajak daerah dinaikkan," tandas Azas seraya meminta Gubernur Anies Baswedan tidak memangkas anggaran kepentingan publik.

PENYESUAIAN ANGGARAN

Sementara Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi sudah mendapatkan laporan seputar tidak mengucurnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. "Kami sudah mengetahui masalah ini," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta, kata Prasetyo, akan memangkas anggaran yang ada. "Tapi, bukan pemotongan anggaran pembangunan. Melainkan mengurangi pemberian suntikan dana untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," terangnya.

Prasetyo menguraikan, dalam rancangan APBD 2020, penyerahan modal daerah (PMD) yang diajukan sebesar Rp 9,75 triliun. Dana senilai itu untuk tujuh BUMD, seperti PDAM Jaya, PT Jakpro, PT MRT, PT Jakarta Tourisindo, PD Sarana Jaya dan Dharma Jaya.

"Bisa juga dengan mengurangi anggaran dari proyek lainnya yang dianggap tidak mendesak. Kami akan sisir dengan teliti," kata Prasetyo yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2020. Sekitar Rp46,84 triliun dari Rp95,9 triliun diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai sembilan program prioritas di bawah koordinasi lima komisi di DPRD. Sedangkan sisanya untuk belanja pegawai.

Setidaknya ada sembilan prioritas pembangunan yang diusulkan. Seluruhnya membutuh-

kan anggaran sebesar Rp46,84 triliun. Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang Pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang Perekonomian Rp4,11 triliun, Komisi C bidang Keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang Pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp18,70 triliun.

ALAMI DEFISIT

Adapun Badan Pusat Statistik mencatat periode Januari-Agustus 2019 secara kumulatif, neraca perdagangan nasional masih defisit sebesar 1,81 miliar US Dollar atau setara Rp 2,5 triliun. Besaran defisit itu membengkak sebesar 10,51 miliar Dolar AS atau setara Rp14,7 triliun sepanjang 2018-Agustus 2019.

Sedangkan posisi utang pemerintah hingga Mei 2019 totalnya Rp 4.571,89 triliun. Kondisi ini pernah diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, dimana pemerintah berkewajiban membayar bunga utang Rp 127 triliun.

(john/rizal/ruh/st)